II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga

pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindakan sendiri atau pihak lain (WJS. Poerwadarminta, 1998: 619).

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh sipembuat dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang menilai, menentukan kehendaknya, tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini bertarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana (Roeslan Saleh, 1981:80).

Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirimuskan oleh si pembuat Undang-Undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya memastikan dalam siapa pembuatannya tidak mudah karena untuk menentukan siapakah yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada, yaitu sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP

Asas legalitas dalam hukum pidana indonesia menentukan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-Undang hukum pidana, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana dalam perundang-undangan yang telah

ada, sebelum perbuatan dilakukan. Meskipun demikian orang tersebut belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya atau apakah dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut, demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Perbuatan pidana hanya untuk menunjukkan pada dilarangnya suatu perbuatan oleh Undang-undang. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung kepada persoalan, apabila orang yang telah melakukan perbuatannya mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang telah melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan, maka ia dapat dipidana. Berarti orang yang melakukan tindak pidana akan dapat dipidana apabila mempunyai kesalahan.

Kesalahan ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Kesengajaan (*opzet?dolus*)

Ada 3 (tiga) kesengajaan dalam hukum pidana:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuannya untuk mencapai suatu tujuan (*ozet als oogmerk*)
- b. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat pasti terjadi (*opzet bij zekeheidsbewustzijn*)
- c. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi disertai keinsyafan hanya dengan kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi (*obzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).

2. Kurang hati-hati (kealpaan/culfa)

Kurang hati-hati/kealpaan (culfa artinya alpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yang suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang hati-hati, sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi (Wirjono Prodjodikoro, 2003: 50)).

Berdasarkan uraian diatas seseorang yang melakukan tindak pidana harus dibuktikan apakah kesalahan tersebut mengandung unsur kesengajaan (*dolus/obzet*) atau kealpaan (*culfa*).

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan akan menentukan berat

ringannya pidana seseorang. Perbuatan pidana dilakukan secara sengaja, ancaman pidananya akan lebih berat dari pada karena kealpaan. Untuk dipidananya seseorang harus ada unsur mampu bertanggungjawab oleh pelaku, dimana pelaku dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut.

Orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan (Roeslan Saleh, 1981: 80).

Istilah pidana atau hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidangnya yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam hukum, tetapi dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan moral, agama dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat khas.

Menurut Soedarto, menyatakan yang dimaksud pidana adalah penderiaatan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi sasaran tertentu sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif yang dikutip oleh Roeslan Saleh, menyatakan bahwa pidana reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara kepada perbuatan delik itu (Roeslan Saleh, 1981: 83).

Berdasarkan definisi diatas dapatlah diartikan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan atas nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan pidana menurut Undang-Undang.

Maka dalam hal pidana, fokusnya adalah pada kekuatan salah satu tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pembuat atau pelaku dengan kata lain perbuatan itu mempunyai peranan yang sangat penting dan syarat yang harus dipenuhi untuk adanya suatu tindak pidana agar pelaku atau subjek tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan.

Adapun ciri atau unsur kesalahan yang dapat dijatuhi hukuman bagi pelaku kejahatan adalah:

1. Dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pembuat
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya kesengajaan atau kesalahan
3. Tidak adanya dasar pemidanaan yang menghapus dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada pembuat.

Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa : barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena akal sehatnya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

B. Pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan hal ini Hakim memegang peranan penting dalam hal penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, meskipun hakim dalam pemeriksaan dipersidangan berpedoman pada hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi dan dakwaan yang dibuat oleh jaksa, dalam undang-undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, Hakim mempunyai kekuasaan dan kebebasan untuk menjatuhkan

putusanya. Hakim dalam melaksanakan putusanya tidak ada tekanan dari pihak manapun, tidak terkait oleh lembaga manapun, Hal ini berarti kekuasaan hakim tersebut bebas dan merdeka.

Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum dan pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Berarti masalah pembedaan sepenuhnya kekuasaan dari hakim (Sudarto, 1986 : 78).

Keyakinan hakim bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia akan tetapi keyakinan yang didukung oleh alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Apabila didalam persidangan (pemeriksaan perkara), hakim tidak mendapatkan dua alat bukti maka hakim belum bisa menjatuhkan pidana atas diri terdakwa. Sebaliknya jika hakim telah mendapat minimal dua alat bukti dan juga di sertai dengan keyakinan yang kuat maka hakim dapat menjatuhkan pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah”.

Berdasarkan Naskah Rancangan KUHP Baru Tahun 1999/2000 terdapat ketentuan tentang tujuan pembedaan dalam Pasal 51 ayat (1) yaitu :

1. Mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikanya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 51 ayat (2) menyatakan “Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”. Rancangan KUHP Baru Tahun 1999/2000 yang mengatur tentang pedoman pidanaaan membuat beberapa macam pedoman :

1. Ada pedoman pidanaaan yang bersifat umum untuk memberi pengarahannya kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;
2. Ada pedoman pidanaaan yang lebih bersifat khusus untuk memberikan pengarahannya pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu;
3. Ada pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

Pedoman pidanaaan yang bersifat umum dirumuskan dalam Rancangan KUHP baru Pasal 52 tahun 1999/2000 sebagai berikut :

Dalam pidanaaan hakim wajib mempertimbangkan :

- Ke-1 kesalahan pembuat;
- Ke-2 motif dan tujuan dilakukan tindak pidana;
- Ke-3 cara melakukan tindak pidana;
- Ke-4 sikap batin pembuat;
- Ke-5 riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
- Ke-6 sikap dan tindakan pembuat sudah melakukan tindak pidana;
- Ke-7 pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
- Ke-8 pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- Ke-9 pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- Ke-10 apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana perkara tindak pidana didasarkan pada:

1. Tuntutan jaksa penuntut umum.
2. Alat bukti.
3. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
4. Petunjuk-petunjuk lain dalam persidangan dan barang bukti.

Berdasarkan pertimbangan hakim atas kasus diatas maka hakim menjatuhkan pidana selama 15 (lima belas) Tahun kurungan penjara terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan kematian, sehingga hukuman itu sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Perlu dipertimbangkan bahwa berat ringanya yang dijatuhkan oleh hakim pada hakikatnya adalah sebagai upaya perbaikan bagi pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian istri oleh suami tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini akan tercapai apabila itu dirasakan telah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, baik ditinjau dari sudut pelaku maupun ditinjau dari sudut masyarakat yang mewakili kepentingan korban.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan pengertian tindak pidana diatas dapat ditemukan beberapa unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana. Unsur-unsur ini penting untuk dibuktikan melalui suatu proses sistem peradilan pidana, merupakan hal pemeriksaan dipersidangan, apabila unsur-unsur itu salah satunya diantaranya tidak terbukti, maka perbuatan itu adalah suatu tindak pidana atau kejahatan dan tersangka harus dibebankan dari segala tuntutan hukum. Perlu kita ketahui beberapa pendapat sarja mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu :

Menurut Moeljatno unsur-unsur atau elemen perbuatan tindak pidana adalah

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur yang melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

(Moeljatno, 1993: 18).

Menurut M. Bassar Sudrajat unsur-unsur yang terkandung dalam suatu delik adalah terdiri dari :

- a. Unsur melawan hukum
- b. Unsur merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan hukum pidana
- d. Pelakunya dapat diancam pidana

(Adami Chazawi, 2002: 78).

Menurut pendapat Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- a. Perbuatan /rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukum

(Adami Chazawi, 2002: 78)

Moeljatno membedakan unsur tindak pidana berdasarkan perbuatan dan pelaku dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :

- 1. Unsur objektif berupa:
 - a. Perbuatan manusia
 - b. Mengandung unsur kesalahan

2. Unsur objektif, berupa:
 - a. Bersifat melawan hukum
 - b. Ada aturannya(Moeljatno, 1993: 64)

D. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan yang dimaksud dalam Hukum Pidana adalah menyangkut “tubuh manusia”. Sementara dalam ilmu pengetahuan hukum pidana atau doktrin, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Berdasarkan pengertian tindak pidana penganiayaan diatas, maka rumusan unsur-unsur penganiayaan sebagai berikut :

- a. Unsur kesengajaan;
- b. Unsur perbuatan;
- c. Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu :
 - 1) Rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
 - 2) Luka tubuh.

Penganiayaan yang dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP adalah sebagai berikut:

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Pasal 351 KUHP telah menerangkan penganiayaan ringan sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Mengenai tindakan hukum ini yang akan diberikan kepada yang bersalah untuk menentukan Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Disebut penganiayaan ringan Karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Rumusan dalam penganiayaan ringan telah diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut:

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Pasal 353 mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Penganiayaan berencana yang diatur dalam Pasal 353 apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor/alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

d. Penganiayaan dengan Sengaja untuk Melukai Berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun).
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Perbuatan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu: perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

E. Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

beberapa prinsip demi menjamin cita-cita hukum hakim dari perkawinan sehingga membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi merupakan dasar Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Kenyataan kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi sedangkan sistem hukum hakim di indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga, karena selama ini masih masuk dalam delik aduan dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan penerapan Pasal tidak menyenangkan, Penganiayaan serta ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, masih dianggap sangat ringan yaitu dengan penerapan denda sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus).

Latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah terungkap dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga, menindak pelaku KDRT serta melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sejak adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) maka ditekankan adanya larangan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dengan cara:

1. Kekerasan fisik

Pembaharuan hukum yang berpihak pada keluarga rentan atau subordinasi khususnya kaum perempuan seperti, pemukulan baik ringan maupun berat yang mengakibatkan luka, memar, bahkan menjurus kepada cacat fisik serta kematian yang dapat dikaitkan kepada kasus penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman berlapis sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kekerasan fisik ini dapat berupa pembunuhan, penganiayaan baik yang dilakukan oleh tangan kosong maupun dengan alat bantu senjata maupun benda tumpul atau yang mengakibatkan hilangnya nyawa, cacat, ataupun luka dan memar, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja (kelalaian) .

2. Kekerasan fisik

Kekerasan yang dilakukan oleh suami atau istri dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak atau bekerja, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat. Hal ini menyangkut juga kemerdekaan seseorang maupun kebebasan seseorang, termasuk merampas kemerdekaan seperti perdagangan orang dalam lingkup keluarga, penculikan, melepaskan orang yang belum dewasa dari kekuasaan orang tua, melarikan orang tua, melarikan wanita, anak, yang semua ini mengakibatkan guncangan kejiwaan, trauma, ketakutan, kehilangan kepercayaan diri.

3. Kekerasan Seksual

Berdasarkan hubungan lingkup rumah tangga, kekerasan dimaksud seperti, pemaksaan hubungan seks suami istri, maupun pemaksaan hubungan seks terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil dan tujuan-tujuan tertentu seperti juga pemuasan nafsu seksual. Kekerasan seksual ini mengakibatkan terganggunya hubungan suami istri dalam

lingkup rumah tangga yang merupakan terganggunya hubungan seksual secara *vertikal* maupun *horisontal*.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Berdasarkan lingkup rumah tangga setiap orang dilarang menelantarkan orang padahal menurut hukum yang berlaku baginya ialah karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan nafkah lahir batin, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak maupun diluar rumah sehingga korban berada dibawah kondisi orang tersebut. Termasuk juga menelantarkan rumah tangga istri dan anak bahkan sebaliknya istri berbuat tidak menghargai martabat suami maupun menelantarkan anak.

Berdasarkan larangan kekerasan dalam lingkup rumah tangga tersebut diatas, maka cara yang dilakukan oleh suami atau istri dalam hukum perkawinan mempunyai 4 (empat) macam kekerasan sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut diatas yang masing-masing kadar pembuatan kekerasan mempunyai sanksi ancaman hukuman yang berbeda-beda yaitu :

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik dapat diancam dengan pidana penjara paling lam 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pasal 44 ayat (1). Dalam hak perbuatan mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, maka ancaman paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Pasal 44 ayat (2). Apabila mengakibatkan matinya korban, maka ancaman pidana 15 (lima belas) Tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Pasal 44 ayat (3). Berdasarkan hal kekerasan yang

dimaksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah yang dilakukan oleh suami atau istri ataupun seblainya yang tidak menimbulkan penyakit ataupun halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan. Maa pencaharian dipidana penjara paling lam 4 (empat) bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kekerasan secara fisik dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diancam dalam Pasal 44 khususnya yang menyebabkan luka atau memar pada tubuh manusia baik dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan alat bantu seperti senjata ataupun benda tumpul diancam dengan Pasal 44 ayat (1),(2) dan (3) sedangkan ayat (4) hanya menekan kan pada perbuatan termasuk kekerasan yang menimbulkan efek apapun.

b. Kekerasan Psikis

Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dapat diancam dengan pidan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Pasal 44 ayat (4). Dalam hal perbuatan yang dimaksud yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pasal 45 ayat (2). Kekerasan psikis ini menyangkut hak seseorang yang mengakibatkan gangguan jiwa, rasa ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, stres, tertekan mental, sempitnya ruang gerak untuk berbuat secara normal, diancam dalam hukuman sebagaimana Pasal 45 ayat (1), sedangkan ayat (2) menenangkan perbuatan kekerasan telah dilakukan tanpa menimbulkan halangan atau penyakit.

c. Kekerasan Seksual

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 46.

Setiap orang yang memaksa orang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 3000.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Menelantarkan rumah tangga perbuatan dapat diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pasal 49 huruf (a) dan (b).

Penelantaran ini dapat berupa mengingkari perjanjian perkawinan, meninggalkan selama 2 (dua) bulan serta tidak memberi nafkah lahir batin, kewajiban memberikan kehidupan, perawatan serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2).

Selain pidana yang diancam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maka Pasal 50 menyatakan hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Tindak pidana kekerasan fisik, psikis dan kekerasan terhadap seksual serta penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dikategorikan sebagai delik aduan, yang selama ini dipakai dalam KUHP seperti perbuatan yang tidak menyenangkan dan tindak penganiayaan, berdasarkan laporan terhadap orang yang dirugikan. Namun sejak adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga masuk dalam delik umum yang diatur secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi , Adami.2002. *Pelajar Hukum Pidana I*, Rajawali Press,Jakarta
- Hamzah, Andi. 2007. *KUHP dan KUHPA*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro.
- Pedoman Penulisan. 2007. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, jakarta.
- Poerwardaminta, WJS.1998. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka. Jakarta.

Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1985. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. CV. Rajawali: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.